



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan Mayjen Sutoyo No.10 Cililitan Jakarta Timur  
Telepon : (021) 8091908– 8002192 Faksimili : (021) 8002265 – 8011753  
Laman : <https://www.bphn.go.id> Email : [humas@bphn.go.id](mailto:humas@bphn.go.id)

---

Nomor : PHN.3-KP.10.02-24

01 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Hal : Penyampaian Bahan Usulan Penilaian Angka Kredit  
Jabatan Fungsional Analis Hukum

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Hukum;
2. Kepala Biro Hukum Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Hukum;
3. Sekretaris Daerah Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Hukum.

di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Analis Hukum untuk penilaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada periode April 2023 oleh Tim Penilai pada Instansi Pembina, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil kerja yang dapat dinilai merupakan pelaksanaan kinerja pejabat fungsional sejak diangkat menjadi Analis Hukum sampai dengan masa periode penilaian pada bulan April 2023 dengan memperhitungkan target Angka Kredit tahunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
2. Tim Penilai pada Instansi Pembina berkedudukan di Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Pembina Teknis, melakukan Penilaian Angka Kredit kepada seluruh jenjang Analis Hukum sesuai dengan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum.
3. Bagi instansi yang belum terdapat Tim Penilai Instansi, menyampaikan bahan usulan Penilaian Angka Kredit kepada Tim Penilai pada Instansi Pembina.

4. Bagi instansi yang telah terdapat Tim Penilai instansi dan telah melakukan penilaian Angka Kredit segera menyampaikan tembusan Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Instansi Pembina sebelum Juni 2023.
5. Penyampaian bahan usulan penilaian Angka Kredit kepada Tim Penilai pada Instansi Pembina paling lambat 30 April 2023.
6. Penilaian sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dan 2 (dua) diajukan dengan Surat Usulan Penilaian Angka Kredit dari Instansi Pengguna sesuai dengan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum.
7. Surat Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana angka 6 (enam), dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen penilaian.
8. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) sebagai berikut:
  - a. Dokumen SKP yang telah dinilai, sesuai dengan periode kinerja yang diusulkan untuk penilaian Angka Kredit, untuk pengusulan terkait kebutuhan kenaikan pangkat maka menyertakan penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. Salinan SK CPNS;
  - c. Salinan SK PNS;
  - d. Salinan SK Pangkat terakhir;
  - e. Salinan SK Jabatan terakhir;
  - f. Salinan SK Pengangkatan Analis Hukum;
  - g. Salinan PAK terakhir (rekomendasi inpassing atau PAK yang telah melakukan penilaian sebelumnya);
  - h. Salinan ijazah terakhir;
  - i. Salinan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) jika memiliki;
9. Dokumen administrasi sebagaimana tercantum pada angka 8 (delapan) dilampirkan dan dikirimkan berupa fisik (*hard copy*) bersamaan dengan Surat Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Hukum.
10. Dokumen penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) sebagai berikut:
  - a. Formulir keterkaitan SKP dengan Angka Kredit JFAH;
  - b. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) sesuai dengan lampiran pada Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum;

- c. Bahan Usulan Penilaian Angka Kredit sesuai dengan lampiran pada Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum;
  - d. Dokumen bukti hasil kerja dan bukti pendukung sesuai dengan Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum;
11. Dokumen penilaian sebagaimana tercantum pada angka 10 (sepuluh) disampaikan berupa softcopy/soft file dapat dalam bentuk flashdisk/link gdrive/link cloud.

Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Kelompok Substansi Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Analis Hukum pada nomor telepon (021) 8011754 ext. 2106 atau Sdr. Jupiter HP: 085715113435 atau Sdr. Hendra HP: 087885649446.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

an. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Yunan Hilmy, S.H., M.H.

NIP. 19631215 199203 1 002

Tembusan:

Yth. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Lampiran

Nomor : PHN.3-KP.10.02-24

Hal : Penyampaian Bahan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Hukum

### **Daftar Kementerian/Lembaga**

#### **I. Kementerian Koordinator**

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM

#### **II. Kementerian**

1. Kementerian Koperasi dan UKM
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kementerian Kesehatan
5. Kementerian Sosial
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia
7. Kementerian Agama
8. Kementerian PPN/Bappenas
9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
11. Kementerian Sekretariat Negara
12. Kementerian BUMN
13. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14. Kementerian Perhubungan
15. Kementerian Hukum dan HAM
16. Kementerian Dalam Negeri
17. Kementerian Ketenagakerjaan
18. Kementerian Pertanian

### **III. Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara/Lembaga Nonstruktural**

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2. Badan Keamanan Laut
3. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
5. Kejaksaan Republik Indonesia
6. Komisi Pemilihan Umum
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum
8. Ombudsman RI
9. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
10. Komisi Yudisial
11. Badan Pengawas Obat dan Makanan
12. Komisi Nasional HAM
13. Badan Kepegawaian Negara
14. Komisi Aparatur Sipil Negara
15. Badan Riset Inovasi Nasional
16. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
17. Badan Siber Sandi Negara
18. Badan Standardisasi Nasional
19. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
20. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

## Daftar Pemerintah Daerah

### **I Pemerintah Provinsi Aceh**

- 1 Pemerintah Kabupaten Bireuen
- 2 Pemerintah Kota Sabang
- 3 Pemerintah Kota Subulussalam

### **II Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

- 1 Pemerintah Kota Medan
- 2 Pemerintah Kabupaten Langkat
- 3 Pemerintah Kota Padang Sidempuan
- 4 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

### **III Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

- 1 Pemerintah Kota Solok
- 2 Pemerintah Kota Sawahlunto
- 3 Pemerintah Kabupaten Agam

### **IV Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**

- 1 Pemerintah Kabupaten Oku
- 2 Pemerintah Kabupaten Muara Enim

### **V Pemerintah Provinsi Riau**

- 1 Pemerintah Kabupaten Indragiri hulu
- 2 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

### **VI Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

- 1 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- 2 Pemerintah Kabupaten Bintan
- 3 Pemerintah Kabupaten Natuna
- 4 Pemerintah Kota Tanjung Pinang

### **VII Pemerintah Provinsi Jambi**

1 Pemerintah Kabupaten Bungo

**VIII Pemerintah Provinsi Bengkulu**

1 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

2 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

3 Pemerintah Kabupaten Kepahiang

**IX Pemerintah Provinsi Bangka Belitung**

1 Pemerintah Kota Pangkalpinang

2 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

3 Pemerintah Kabupaten Bangka

4 Pemerintah Kabupaten Belitung

5 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

**X Pemerintah Provinsi Lampung**

1 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

2 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

3 Pemerintah Kota Metro

4 Pemerintah Kabupaten Pringsewu

5 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

6 Pemerintah Kabupaten Way Kanan

**XI Pemerintah Provinsi Banten**

1 Pemerintah Kabupaten Pandeglang

2 Pemerintah Kota Tangerang Selatan

3 Pemerintah Kota Tangerang

**XII Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

**XIII Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

1 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

2 Pemerintah Kabupaten Karawang

3 Pemerintah Kabupaten Purwakarta

- 4 Pemerintah Kabupaten Subang
- 5 Pemerintah Kabupaten Bandung
- 6 Pemerintah Kota Bandung
- 7 Pemerintah Daerah Kota Cimahi
- 8 Pemerintah Kabupaten Ciamis
- 9 Pemerintah Kota Banjar
- 10 Pemerintah Kota Depok
- 11 Pemerintah Kota Bekasi
- 12 Pemerintah Kota Bogor

**XIV Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

- 1 Pemerintah Kabupaten Purworejo
- 2 Pemerintah Kabupaten Tegal
- 3 Pemerintah Kabupaten Blora
- 4 Pemerintah Kabupaten Semarang
- 5 Pemerintah Kabupaten Magelang
- 6 Pemerintah Kota Pekalongan
- 7 Pemerintah Kabupaten Boyolali
- 8 Pemerintah Kabupaten Temanggung
- 9 Pemerintah Kabupaten Pemasang
- 10 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
- 11 Pemerintah Kabupaten Cilacap
- 12 Pemerintah Kabupaten Demak
- 13 Pemerintah Kabupaten Klaten
- 14 Pemerintah Kabupaten Karanganyar
- 15 Pemerintah Kabupaten Pati
- 16 Pemerintah Kabupaten Kendal
- 17 Pemerintah Kabupaten Banyumas



18 Pemerintah Kabupaten Pekalongan

19 Pemerintah Kota Tegal

**XV Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

1 Pemerintah Kabupaten Tulungagung

2 Pemerintah Kabupaten Trenggalek

3 Pemerintah Kabupaten Madiun

4 Pemerintah Kabupaten Pasuruan

5 Pemerintah Kabupaten Lamongan

6 Pemerintah Kota Malang

7 Pemerintah Kabupaten Mojokerto

8 Pemerintah Kota Batu

9 Pemerintah Kabupaten Bangkalan

10 Pemerintah Kabupaten Jombang

11 Pemerintah Kabupaten Kediri

12 Pemerintah Kabupaten Jember

13 Pemerintah Kabupaten Lumajang

14 Pemerintah Kabupaten Gresik

15 Pemerintah Kota Probolinggo

16 Pemerintah Kota Kediri

17 Pemerintah Kota Madiun

18 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

**XVI Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta**

1 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

2 Pemerintah Kabupaten Sleman

3 Pemerintah Kota Yogyakarta

**XVII Pemerintah Provinsi Bali**

1 Pemerintah Kabupaten Karangasem

- 2 Pemerintah Kota Denpasar
- 3 Pemerintah Kabupaten Klungkung
- 4 Pemerintah Kabupaten Badung
- 5 Pemerintah Kabupaten Buleleng
- 6 Pemerintah Kabupaten Tabanan
- 7 Pemerintah Kabupaten Gianyar

**XVIII Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat**

- 1 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

**XIX Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- 1 Pemerintah Kabupaten Sikka
- 2 Pemerintah Kabupaten Malaka
- 3 Pemerintah Kabupaten Flores Timur
- 4 Pemerintah Kabupaten Ende

**XX Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**

- 1 Pemerintah Kabupaten Sambas
- 2 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

**XXI Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan**

- 1 Pemerintah Kota Banjarmasin
- 2 Pemerintah Kabupaten Banjar
- 3 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 4 Pemerintah Kabupaten Tabalong
- 5 Pemerintah Kabupaten Tapin

**XXII Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**

- 1 Pemerintah Kabupaten Barito Timur
- 2 Pemerintah Kabupaten Sukamara
- 3 Pemerintah Kabupaten Katingan
- 4 Pemerintah Kabupaten Lamandau

- 5 Pemerintah Kabupaten Kapuas
- 6 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
- 7 Pemerintah Kabupaten Barito Utara
- 8 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- 9 Pemerintah Kabupaten Murung Raya

**XXIII Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**

- 1 Pemerintah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Kabupaten Paser

**XXIV Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara**

- 1 Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
- 2 Pemerintah Kabupaten Nunukan

**XXV Pemerintah Provinsi Gorontalo**

**XXVI Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

- 1 Pemerintah Kabupaten Pangkajene
- 2 Pemerintah Kabupaten Enrekang
- 3 Pemerintah Kota Parepare
- 4 Pemerintah Kabupaten Bulukumba
- 5 Pemerintah Kabupaten Barru
- 6 Pemerintah Kabupaten Sinjai
- 7 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
- 8 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
- 9 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
- 10 Pemerintah Kabupaten Jeneponto
- 11 Pemerintah Kab. Pinrang
- 12 Pemerintah Kabupaten Gowa
- 13 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
- 14 Pemerintah Kabupaten Luwu

**XXVII Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara**

- 1 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 2 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

**XXVIII Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**

**XXIX Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara**

- 1 Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
- 2 Pemerintah Kabupaten Wakatobi
- 3 Pemerintah Kabupaten Buton
- 4 Pemerintah Kabupaten Sigi
- 5 Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

**XXX Pemerintah Provinsi Maluku**

- 1 Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
- 2 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

**XXXI Pemerintah Provinsi Maluku Utara**

- 1 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan